



UNIT LAYANAN PENGADAAN MAHKAMAH AGUNG RI
KORWIL SULSELBAR PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
POKJA PN MAROS TAHUN ANGGARAN 2018

Jl. Jend. Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar

BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

Nomor : 006/Pokja.PN.Mrs/ULP-MARI/VI/2018

Satuan Kerja : **PENGADILAN NEGERI MAROS**
Kode Lelang : **3666555**
Kegiatan : **Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Maros Tahun Anggaran 2018**
Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2018
Nilai Pagu : Rp. 4.655.000.000,00
Nilai HPS : Rp. 4.652.559.168,79

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, bertempat di Ruang Rapat POKJA PN MAROS, kami Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pengadilan Negeri Maros, telah membuka Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan **Jasa Konstruksi Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Maros Tahun Anggaran 2018** melalui LPSE Mahkamah Agung RI (www.lpse.mahkamahagung.go.id). Adapun pelaksanaan Pemberian Penjelasan sebagai berikut:

I. PENJELASAN

Pada pukul 10.00 WITA, sesuai jadwal tahapan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi **Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Maros Tahun Anggaran 2018** membuka Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan secara elektronik (*e-Procurement*) terhadap penyedia/ perusahaan yang telah mendaftar yang berlangsung pada :

Tanggal : 14 Mei 2018
Waktu : 10.00 - 12.00 WITA.
Melalui : www.lpse.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh proses pengadaan paket pekerjaan tersebut diatas, dilaksanakan secara "e-Procurement", sehingga setiap penyampaian Dokumen dilaksanakan sesuai tata cara e-Procurement melalui LPSE Mahkamah Agung RI.
2. Setiap peserta/calon penyedia memperhatikan dan mengikuti jadwal yang telah tercantum di dalam portal LPSE Mahkamah Agung RI.
3. Setiap peserta/calon penyedia diminta memberikan (meng-upload) setiap Dokumen yang dipersyaratkan oleh Panitia didalam Dokumen Pengadaan. Sebagai contoh : Form Isian Kualifikasi, Bukti Pajak, Ijazah Tenaga Teknis, dll.

II. TANYA JAWAB

Calon peserta yang mendaftar sampai kegiatan aanwijzing terdapat sebanyak 17 calon peserta. Panitia pengadaan memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menanyakan beberapa hal yang belum jelas terhadap Dokumen Pengadaan yang telah diberikan/diupload.



UNIT LAYANAN PENGADAAN MAHKAMAH AGUNG RI KORWIL SULSELBAR PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN POKJA PN MAROS TAHUN ANGGARAN 2018

Jl. Jend. Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar

Hasil pemberian penjelasan (*rincian lihat menu penjelasan paket di LPSE Mahkamah Agung RI*) sebagai berikut:

Beranda » Informasi Lelang

Informasi Lelang **Pertanyaan 1**

Kode Lelang	3666555														
Nama Lelang	Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Maros Kelas IB Tahun Anggaran 2018 Detail														
Tahap Lelang Saat Ini	Pengumuman Pascakualifikasi [...] Edit														
Jumlah Peserta	17 Peserta														
Dokumen Pengadaan	<p>Dokumen Lelang</p> <p>Dokumen Pengadaan [3666555] - Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Maros Kelas IB Tahun Anggaran 2018.pdf</p> <p>Adendum Cetak</p> <table><tr><td>Lembar Data Kualifikasi (LDK)</td><td>✓</td></tr><tr><td>Lembar Data Pemilihan (LDP)</td><td>✓</td></tr><tr><td>Persyaratan Dokumen</td><td></td></tr><tr><td>Rincian HPS</td><td>✓</td></tr><tr><td>Spesifikasi Teknis dan Gambar</td><td></td></tr><tr><td>Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)</td><td></td></tr><tr><td>Informasi Lainnya</td><td></td></tr></table> <p>1. Silahkan lakukan perubahan terhadap semua bab diatas 2. Silahkan simpan seluruh dokumen jika akan melakukan adendum 3. Jangan lupa lakukan cetak saat semua bab diatas telah dilakukan perubahan 4. Adendum yang sudah dicetak akan disampaikan kepada semua peserta lelang</p>	Lembar Data Kualifikasi (LDK)	✓	Lembar Data Pemilihan (LDP)	✓	Persyaratan Dokumen		Rincian HPS	✓	Spesifikasi Teknis dan Gambar		Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)		Informasi Lainnya	
Lembar Data Kualifikasi (LDK)	✓														
Lembar Data Pemilihan (LDP)	✓														
Persyaratan Dokumen															
Rincian HPS	✓														
Spesifikasi Teknis dan Gambar															
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)															
Informasi Lainnya															
Jumlah Penawaran	0 Penawaran														
Informasi Lainnya	<p>+ Upload</p> <p>Informasi Lainnya dapat berupa Berita Acara lain yang ditujukan kepada semua peserta jika terdapat kendala di luar kendali Pokja ULP.</p>														

Terdapat satu pertanyaan yang diajukan oleh peserta dengan ID **54586555** dalam masa waktu yang telah disediakan, dan hal tersebut juga langsung dijawab oleh Panitia setelah masa *aanwijzing* berakhir. Selanjutnya, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak terdapat peserta lain yang mengajukan pertanyaan mengenai seputar dokumen lelang dan pelaksanaannya, maka Panitia menutup kegiatan *aanwijzing* pada pukul 12.00 WITA. *Screenshot Aanwijzing* terlampir di bawah.



UNIT LAYANAN PENGADAAN MAHKAMAH AGUNG RI KORWIL SULSELBAR PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN POKJA PN MAROS TAHUN ANGGARAN 2018

Jl. Jend. Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar

Beranda » Informasi Lelang » Penjelasan Lelang

Informasi Lelang

Pertanyaan 1

Kode Lelang 3666555

Nama Paket Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Maros Kelas IB Tahun Anggaran 2018

Sisa Waktu 0 hari / 0 jam / 0 menit

Pembukaan

Selamat pagi, para peserta lelang yang kami hormati.

Kami menerima pertanyaan yang berkaitan dengan isi dan persyaratan dalam dokumen lelang. Adapun saran yang akan kami jadikan dasar untuk melakukan perubahan isi dokumen apabila diperlukan.

Terima kasih

SMK3K PERATURAN - Bab

14 Mei 2018 09:02

Berdasarkan Pengumuman Pelelangan Pada Point Syarat Kualifikasi, Terdapat syarat yang menurut kami bersifat Mubazir, Tumpang tindih dan berpotensi melanggar aturan yang berlaku yaitu Syarat Memiliki SMK3 Perusahaan, ISO, OHSAS. R 54586555

- SMK3 Perusahaan adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku secara Nasional yang didasarkan kepada Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013, PP No. 50 Tahun 2012. Dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi "Setiap Perusahaan Wajib Menerapkan SMK3 diperusahaan yang mempekerjakan pekerja / buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai Tingkat Potensi Bahaya Tinggi".

- Berdasarkan Permen PU No. 05/PR/PM/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Menerangkan Bahwa Penerapan SMK3 Bidang PU ditetapkan berdasarkan Potensi Bahaya, Potensi Bahaya Tinggi Apabila Pekerjaan Bersifat berbahaya dan / atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan / atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

- OHSAS atau singkatan dari Occupational Health dan Safety Assesmen Series adalah Suatu Standar Internasional untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditempat Kerja / Perusahaan.

- Kedua Sistem tersebut (SMK3 dan OHSAS) adalah suatu sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Pemeriksaan dan Pengambilan Tindakan yang bersifat Konsisten dan Terus Menerus untuk Mengidentifikasi, Mengendalikan Resiko Bahaya Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja / Perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, alangkah bijaknya Pokja Jika Perusahaan Diberi Kesempatan Seluas-luasnya untuk mengikuti Pelelangan ini, Baik itu perusahaan yang memiliki sertifikat OHSAS ataupun Perusahaan yang memiliki sertifikat SMK3.

Dear Peserta dengan ID 54586555,

Dengan ini kami menghaturkan apresiasi setinggi-tingginya atas masukan yang diberikan kepada kami, dan masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen lelang selanjutnya. P ULP PN MAROS
14 Mei 2018 13:00

Mengenai pertanyaan ID 54586555, maka kami memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pokja harus menganut asas terbuka sesuai Lampiran Penjelasan atas Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 5 tentang Prinsip Pengadaan yang berbunyi: "Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas". Pengadaan ini juga memberlakukan syarat SMK3 Perusahaan dan OHSAS mengingat manfaat profesionalisme dalam bekerja yang diharapkan teralisasi dalam hasil kerja, dapat terwakili melalui penetapan syarat SMK3 Perusahaan dan OHSAS.
2. Anggapan tentang berpotensi melanggar aturan, maka kami tidak berwenang memberikan jawaban tentang persoalan tersebut, karena ada lembaga negara yang lebih berwenang untuk menyimpulkan hal tersebut. Kami hanya berusaha mengikuti aturan pada pasal 44 ayat 9 Perpres 16 Tahun 2018 yang berbunyi: "Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan diskriminatif dan objektif".
3. Kami juga memahami bahwa persyaratan ISO dalam hal keselamatan kerja sesuai pasal 100 ayat 3 Perpres 54 Tahun 2010 lebih tepat dipersyaratkan untuk perusahaan yang berafiliasi memproduksi barang dalam negeri, namun kami berpendapat bahwa Pokja Pemilihan menilai pekerjaan konstruksi pada Pengadilan Negeri Maros membutuhkan pekerja / buruh minimal 100 orang sehingga syarat tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 dan 2 PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal ini juga didasarkan pada hasil kajian kami terhadap RKS yang di upload pada dokumen lelang ini.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Saudara ID 54586555, semoga dapat menjadi pertimbangan. Terima Kasih.

Salam Pengadaan.



**UNIT LAYANAN PENGADAAN MAHKAMAH AGUNG RI
KORWIL SULSELBAR PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
POKJA PN MAROS TAHUN ANGGARAN 2018**

Jl. Jend. Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar

Demikian Berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan beserta addendum di dalamnya ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan/ketentuan dalam Dokumen Pengadaan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**POKJA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
PENGADILAN NEGERI MAROS
TAHUN ANGGARAN
2018**